



**LAPORAN AKTUALISASI
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
ANGKATAN II**

**PEMUTAKHIRAN DATA POSTUR APBN PADA WEBSITE
PUSKAJIANGGARAN.DPR.GO.ID**

Nama : Damia Liana
NIP : 199310142019032002
Jabatan : Analis APBN Ahli Pertama

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan II – 2019

Judul : Pemutakhiran Data Postur APBN pada Website
puskajianggaran.dpr.go.id
Nama : Damia Liana
NIP : 199310142019032002
NDh : 07
Golongan/Pangkat : III-a / Penata Muda
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 30 Agustus 2019

Mengetahui,

Coach

Menyetujui,

Mentor



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP. 196902082003121003



Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
NIP. 198806212014022001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyusun laporan aktualisasi tepat pada waktunya

Laporan aktualisasi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran.
3. Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM., selaku mentor.
4. Agus Supriyono, S.S., M.A.P., selaku *coach*.

Laporan aktualisasi ini menyajikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai Analis APBN Ahli Pertama di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta Peran dan kedudukan ASN. Laporan aktualisasi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 30 Agustus 2019

Damia Liana

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAGIAN I	1
A. Latar Belakang	1
1. Profil Organisasi	1
2. Kondisi Saat Ini	6
3. Kondisi yang diharapkan	8
4. Identifikasi Isu	9
5. Teknis Analisis USG	10
6. Gagasan Pemecahan Isu	12
B. TUJUAN	12
C. MANFAAT	12
BAGIAN II	14
A. RANCANGAN AKTUALISASI	14
B. Deskripsi kegiatan :	21
1. Kegiatan 1	21
2. Kegiatan 2	24
3. Kegiatan 3	28
4. Kegiatan 4	31
C. STAKEHOLDER	35
D. ANALISIS DAMPAK	35
E. TIME TABLE KEGIATAN	36
BAGIAN III	37
A. KESIMPULAN	37
B. SARAN	37
DAFTAR ISTILAH	38
LAMPIRAN	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	4
Gambar 2. Formulir Sasaran Kinerja PNS	6
Gambar 3. Website Pusat Kajian Anggaran	7
Gambar 4. Tahapan Kegiatan Aktualisasi.....	15
Gambar 5. Kegiatan 1 dari aktualisasi	21
Gambar 6. Laporan kepada atasan	22
Gambar 7. Kegiatan 2 dari aktualisasi	24
Gambar 8. Kegiatan 3 dari aktualisasi	28
Gambar 9. Kegiatan Presentasi internal	29
Gambar 10. Kegiatan 4 dari aktualisasi	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG	10
Tabel 2. Kegiatan Aktualisasi	16
Tabel 3. Keterkaitan Nilai-nilai dengan kegiatan aktulisasi.....	21
Tabel 4. Keterkaitan Nilai-nilai dengan kegiatan aktulisasi.....	25
Tabel 5. Keterkaitan Nilai-nilai dengan kegiatan aktulisasi.....	28
Tabel 6. Keterkaitan Nilai-nilai dengan kegiatan aktulisasi.....	32
Tabel 7. Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan	35
Tabel 8. Jadwal Kegiatan	36

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Profil Organisasi

a. Pusat Kajian Anggaran

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam menjalankan fungsinya terutama terkait fungsi anggaran, maka dibentuklah Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu unit *supporting system* di bawah Badan Keahlian DPR RI.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran;
- Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran;
- Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran;
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala BK .

b. Visi Misi Organisasi

VISI

"Menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel"

Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan,

keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

- Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- Memperkuat manajemen pengetahuan.
- Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

c. Struktur Organisasi

Sebagai sebuah organisasi tentunya Pusat Kajian Anggaran memiliki struktur organisasi. Pusat Kajian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan juga didukung oleh bagian Tata Usaha serta terdiri atas para Analis APBN. Susunan dari struktur organisasi Pusat Kajian Anggaran adalah sebagai berikut :

terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Untuk Analis APBN Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD;
- Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan dalam rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- Pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan Lembaga lainnya;
- Menyusun analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD;
- Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri;
- Menyusun Analisis Ringkas Cepat;
- Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC);
- Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output;

Gambar 1. Struktur Organisasi



d. Penjelasan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN

terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Untuk Analis APBN Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD;
- Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan dalam rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- Pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan Lembaga lainnya;
- Menyusun analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD;
- Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri;
- Menyusun Analisis Ringkas Cepat;
- Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC);
- Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output;

- Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan; dan
- Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah disetujui adalah seperti tabel di bawah ini :

Gambar 2. Formulir Sasaran Kinerja PNS

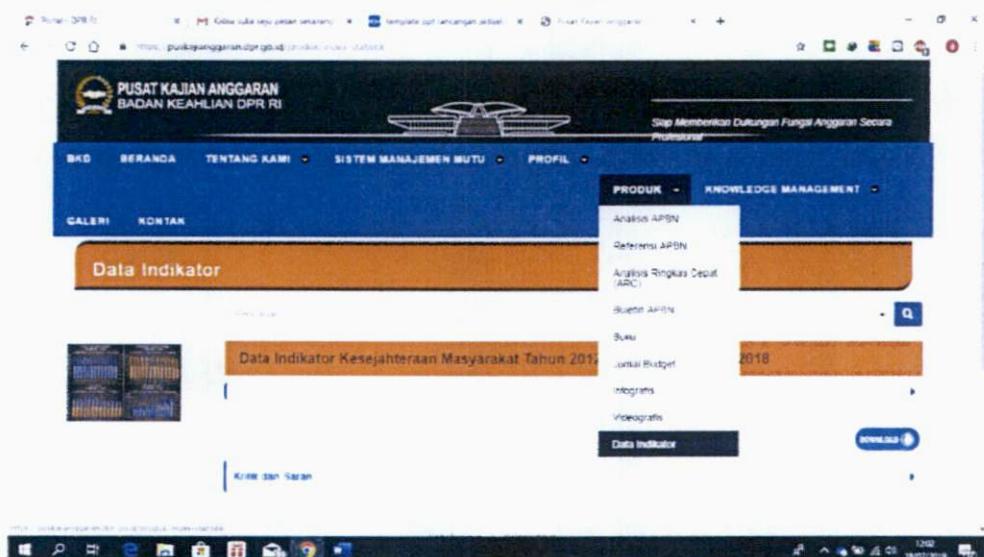
**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama	Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si.	1	Nama	DAMIA LIANA, S.E.			
2	NIP	19710911 199703 1 005	2	NIP	19831014 201903 2 002			
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Utama Madya/ IV/d	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda/ III/a			
4	Jabatan	Kepala Pusat Kajian Anggaran	4	Jabatan	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama			
5	Unit Kerja	PUSAT KAJIAN ANGGARAN	5	Unit Kerja	PUSAT KAJIAN ANGGARAN			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN			AK*	TARGET			
				AK*	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD			0	6	dokumen	100	9
							bulan	0

2. Kondisi Saat Ini

- 1) Untuk mewujudkan Visi Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel yaitu pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, Pusat Kajian Anggaran memiliki website puskajianggaran.dpr.go.id yang berisikan tentang hasil kerja dari para Analis APBN dan juga berisi tentang informasi terkait dengan APBN. Salah satu informasi yang dapat diakses pada website www.puskajianggara.dpr.go.id adalah data indikator pada menu produk.

Gambar 3. Website Pusat Kajian Anggaran



Namun sampai saat ini data yang bisa diakses pada menu produk hanya satu data terkait indikator kesejahteraan yang merupakan bagian dari data asumsi dasar ekonomi makro, sedangkan data-data APBN terdiri atas asumsi dasar ekonomi makro, data ringkasan APBN, data pendapatan negara, data belanja pemerintah pusat, data transfer ke daerah dan dana desa, serta data pembiayaan anggaran. Untuk itu diperlukan adanya pemutakhiran data-data postur APBN sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan oleh staf Pusat Kajian Anggaran, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga masyarakat umum.

- 2) Belum terasahnya keterampilan CPNS Analis APBN dalam penulisan analisis dengan menggunakan metode ilmiah.

Analisis APBN sebagai *Supporting System* Anggota DPR RI dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan metode ilmiah dalam menyusun analisis terkait dengan anggaran. Perubahan lingkungan yang cepat juga menuntut Analis APBN untuk tanggap dalam

mengelakkan analisis terkait dengan isu-isu terkini, sehingga diharapkan output yang dihasilkan efektif dalam memberikan dukungan keharian bagi Anggota DPR RI. Pusat Kajian Anggaran, difasilitasi dengan koran maupun internet agar bisa selalu mengikuti perkembangan isu terkini, namun fasilitas tersebut belum cukup dalam meningkatkan kemampuan CPNS Analis APBN. Oleh karena itu mekanisme lebih kuat untuk mendorong kemampuan CPNS Analis APBN sehingga diharapkan kedepannya para CPNS Analis APBN dapat berkontribusi dan lebih professional dalam bekerja.

- 3) Belum optimalnya pelaksanaan tugas/fungsi pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI terkait isu-isu APBN.

Berdasarkan hasil survei terkait indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2017, diketahui bahwa Kemudahan Mendapatkan Layanan Dukungan Keahlian mendapatkan skor terendah yaitu 62,11 persen dan hanya 2,48 persen yang menyatakan sangat puas pada layanan ini. Salah satu dukungan keahlian yang menjadi tugas dan fungsi Analis APBN adalah melakukan pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI, namun fungsi ini masih belum berjalan secara optimal berjalan. Sehingga dibutuhkan adanya optimalisasi dalam pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI.

3. Kondisi yang diharapkan

Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini, melalui aktualisasi ini diharapkan kondisi ideal dari masalah yang terjadi adalah :

- 1) Mutakhirnya data-data APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id dan kedepannya data-data postur APBN tersebut dapat diakses melalui website Pusat Kajian Anggaran

sehingga mempermudah Anggota DPR RI dan masyarakat umum dalam mencari data terkait APBN.

- 2) Terampilnya CPNS Analis APBN dalam penulisan analisis dengan menggunakan metode ilmiah.
- 3) Optimalnya pelaksanaan tugas/fungsi pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI terkait isu-isu APBN.

4. Identifikasi Isu

Tugas dan fungsi seorang Analis APBN diantaranya adalah menyusun analisis terkait Anggaran untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, mengumpulkan data dari setiap Kementerian /Lembaga/ Pemda/ Lembaga lainnya, serta melakukan melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-rapat DPR RI. Berdasarkan pengalaman selama beberapa bulan bekerja pada Pusat Kajian Anggaran, Penulis menemukan beberapa isu yang layak untuk dan diangkat pada kegiatan aktualisasi ini. Beberapa isu yang akan diangkat ini merupakan hasil diskusi dengan rekan-rekan kerja pada Pusat Kajian Anggaran, isu tersebut diantaranya adalah :

- 1) Belum mutakhirnya data-data APBN di website puskajianggaran.dpr.go.id
- 2) Belum terasahnya keterampilan CPNS Analis APBN dalam penulisan analisis dengan menggunakan metode ilmiah.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan tugas/fungsi pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI terkait isu-isu APBN.

5. Teknis Analisis USG

Tabel 1. Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai	Ranking
		U	S	G		
1	<p>Belum mutakhirnya data-data APBN di website puskajianggaran.dpr.go.id</p> <p>Alasan: Selama ini pada menu data indikator baru ada satu data terkait kesejahteraan masyarakat dan belum terdapat data-data mengenai postur APBN. Untuk itu data-data terkait postur APBN perlu untuk dimutakhirkan.</p>	4	4	5	13*	1*
2	<p>Belum terasahnya keterampilan CPNS Analis APBN dalam penulisan analisis dengan menggunakan metode ilmiah.</p> <p>Alasan : Kemampuan metode ilmiah dan penulisan analisis perlu ditingkatkan karena salah satu tugas dan fungsi Analis APBN adalah menyusun analisis APBN sebagai bentuk dukungan kepada anggota DPR RI.</p>	3	3	3	9	3
3	<p>Belum optimalnya pelaksanaan tugas/fungsi pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI terkait isu-isu APBN.</p> <p>Alasan : Salah satu tugas dan fungsi Analis APBN adalah melakukan pendampingan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fungsi ini tentunya harus bisa lebih dioptimalkan karena Pusat Kajian Anggaran merupakan <i>supporting system</i> Anggota DPR RI.</p>	3	3	4	10	2

- U = *Urgency* (Penting)

DPR RI akan memasuki periode baru yaitu periode tahun 2019-2024, sehingga anggota DPR RI yang baru membutuhkan informasi terkait dengan APBN. Untuk itu sebagai *supporting system* Anggota DPR RI anggota DPR RI, Pusat Kajian Anggaran harus bisa menyediakan informasi terkait dengan postur APBN.

Salah satu tugas dan fungsi analis APBN adalah mengumpulkan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan Lembaga lainnya, selama ini data postur APBN belum terinventarisasi dengan baik, sehingga perlu (*Urgency*) untuk dilakukan pemutakhiran pada pengumpulan data postur APBN. Pemutakhiran data ini dapat dilakukan dengan menambahkan data postur APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id, sehingga data APBN bisa selalu diperbarui dan juga dapat digunakan oleh anggota DPR RI dan juga oleh masyarakat umum.

- S = *Seriousness* (Keseriusan)

Data-data postur APBN selalu berkembang setiap tahunnya, selain itu informasi tentang data-data APBN juga dapat digunakan oleh anggota DPR RI sebagai salah satu sumber informasi dalam rapat-rapat pembahasan bersama pemerintah terkait anggaran, sehingga dibutuhkan keseriusan (*Seriousness*) dalam pemutakhiran data-data postur APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id.

- G = *Growth* (Berkembangnya Isu)

Saat ini website puskajianggaran.dpr.go.id terutama pada menu Produk Data Indikator masih belum ada data tentang postur APBN, sehingga perlu adanya (*Growth*) pengembangan data pada menu Produk Data Indikator sehingga isinya lebih beragam dan terbarukan.

6. Gagasan Pemecahan Isu

Pemutakhiran data-data postur APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id merupakan salah satu tugas Analis APBN dalam mendukung salah satu fungsi anggota Dewa Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu dalam fungsi Anggaran. Dengan adanya data-data postur APBN pada website Pusat Kajian Anggaran diharapkan dapat mempermudah anggota DPR RI dalam menemukan informasi tentang APBN dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja, selain anggota DPR RI tentunya data-data postur APBN ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

B. TUJUAN

Pemutakhiran data-data APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id selaras dengan visi dari Pusat Kajian Anggaran yang professional dan juga akuntabel yaitu bekerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar serta menyajikan informasi kepada publik, sehingga pemutakhiran ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang lebih mudah tentang data-data APBN kepada anggota DPR RI dan juga masyarakat umum.

C. MANFAAT

a. Internal

Memudahkan pencarian tentang informasi data-data postur APBN untuk analisis yang berhubungan dengan APBN karena data-data tersebut sudah tersedia pada website Pusat Kajian anggaran sehingga pencarian data menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Ekternal

- Memberikan informasi kepada anggota DPR RI tentang postur dan perkembangan APBN.
- Memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang data-data APBN melalui website Pusat Kajian Anggaran.

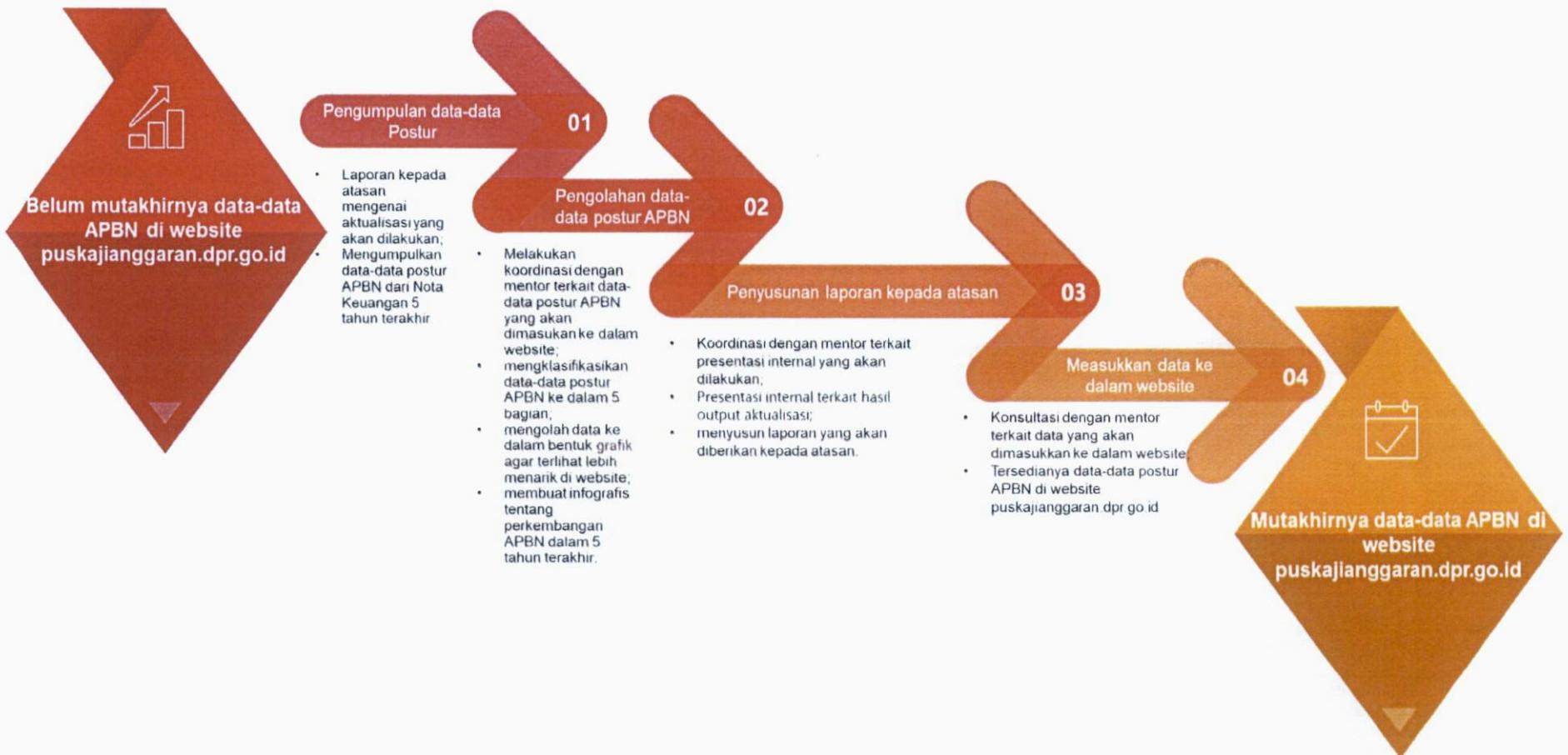
BAGIAN II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja	: Pusat Kajian Anggaran
Identifikasi Isu	: 1. Belum mutakhirnya data-data di Website puskajianggaran.dpr.go.id 2. Belum terasahnya keterampilan CPNS Analis APBN dalam penulisan analisis dengan menggunakan metode ilmiah. 3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas/fungsi pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI terkait isu-isu APBN
Isu yang diangkat	: Belum mutakhirnya data-data di website puskajianggaran.dpr.go.id
Gagasan Pemecahan Isu	: Mutakhirnya data-data di website puskajianggaran.dpr.go.id

Gambar 4. Tahapan Kegiatan Aktualisasi



Tabel 2. Kegiatan Aktualisasi

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterikatan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Pengumpulan data-data postur APBN	<p>1.2. Laporan kepada atasan mengenai aktualisasi yang akan dilakukan.</p> <p>1.2. Mengumpulkan data-data postur APBN dari Nota Keuangan tahun 2014-2018.</p>	<p>1.1. Laporan singkat dari pertemuan dengan atasan.</p> <p>1.2. Terkumpulnya data-data postur APBN dari Nota Keuangan 2014-2018 dalam bentuk tabel angka di excel.</p>	<p>Nilai Dasar PNS :</p> <ul style="list-style-type: none"> Akuntabilitas Adanya laporan kepada atasan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari penulis atas aktualisasi yang akan dikerjakan. Etika Publik Salah satu bentuk dukungan keahlian seorang analis APBN dalam kegiatan ini adalah mengumpulkan data-data terkait psotur APBN yang nantinya data tersebut akan diolah. Komitmen Mutu Pengumpulan data-data postur APBN belum dilakukan sebelumnya, sehingga hal ini merupakan suatu pembaruan pada website Pusat Kajian Anggaran. Peran dan Kedudukan ASN: Pelayan Publik 	<p>1. Kegiatan ini mendukung visi organisasi yaitu menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang professional, andal dan akuntabel.</p> <p>2. Rangkaian kegiatan ini mendukung misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan.</p>	<p>1. Akuntabilitas;</p> <p>2. Profesionalitas;</p> <p>3. Integritas.</p>

				Mengumpulkan data-data postur APBN, sehingga data-data tersebut dapat ditampilkan pada website puskajianggaran.dpr.go.id dan data-data postur APBN tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.		
2	Pengolahan data-data postur APBN yang akan dimasukan ke dalam website ke dalam lima bagian yaitu : asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan negara, belanja pemerintah pusat, transfer daerah dan dana desa, serta pembiayaan anggaran	2.1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait denga data-data yang akan di masukan ke dalam website; 2.2. Mengelompokan/ mengklasifikasikan data-data postur APBN ke dalam lima bagian; 2.3. Mengolah data-data tersebut dari bentuk tabel angka ke dalam bentuk grafik yang lebih menarik;	2.1. Laporan singkat tentang hasil konsultasi dengan mentor. 2.2. Terkelompoknya data- data postur APBN ke dalam lima bagian, yaitu asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan negara, belanja pemerintah pusat, transfer daerah dan dana desa, serta pembiayaan anggaran dalam bentuk excel. 2.3. Terbentuknya grafik dari data-data postur APBN;	Nilai Dasar PNS: <ul style="list-style-type: none"> Akuntabilitas Pengolahan data-data APBN merupakan salah satu tugas dan fungsi analis APBN sehingga kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Analis APBN. Etika Publik Adanya komunikasi yang baik dengan atasan merupakan nilai dasar bagi ASN. Komitmen Mutu Komitmen untuk menyediakan informasi tentang APBN dengan menambahkan konten data pada website Pusat Kajian Anggaran. 		

		<p>2.4. Membuat analisis singkat dalam bentuk infografis untuk memberikan informasi tentang perkembangan APBN kepada pembaca.</p>	<p>2.4. Terbentuknya infografis dari perkembangan APBN lima tahun terakhir.</p>	<p>Peran dan Kedudukan ASN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelayan Publik Mengolah data dalam bentuk grafik dan membuat analisis singkat dalam bentuk infografis sehingga data-data postur APBN tersebut dapat lebih mudah untuk dibaca merupakan salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat. 	
3	Penyusunan Laporan hasil pengolahan data kepada atasan	<p>3.1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan presentasi internal;</p> <p>3.2. Presentasi internal terkait hasil output aktualisasi;</p> <p>3.3. Penyusunan laporan untuk diserahkan kepada atasan.</p>	<p>3.1. Laporan singkat tentang hasil konsultasi dengan mentor.</p> <p>3.2. Undangan presentasi internal dan daftar hadir peserta.</p> <p>3.3. Laporan yang akan diserahkan kepada atasan.</p>	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akuntabilitas Adanya hasil laporan kegiatan mencerminkan adanya alat dalam pelaksanaan akuntabilitas. Etika Publik Adanya konsultasi dengan mentor merupakan salah satu nilai yang diterapkan dalam tahapan kegiatan ini, konsultasi ini tentunya bertujuan untuk menjaga komunikasi dan juga bentuk kerja sama antara penulis dengan mentor. Nasionalisme Adanya komunikasi dan kerjasama antara penulis dengan atasan dan juga 	

				<p>mentor merupakan salah satu penerapan nilai nasionalisme dalam bekerja.</p> <p>Peran dan Kedudukan ASN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelayan Publik Laporan kepada atasan terkait pemutakhiran data-data postur APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id merupakan salah satu upaya agar data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum 	
4	Memasukkan data-data postur APBN ke dalam website puskaji anggaran.dpr. go.id	<p>4.1. Konsultasi dengan mentor terkait data yang akan dimasukkan ke dalam website.</p> <p>4.2. Tersedianya data-data postur APBN di website puskajianggaran.dpr. go.id</p>	<p>4.1. Laporan singkat tentang hasil konsultasi dengan mentor.</p> <p>4.2. Tersedianya data-data APBN dalam website www.puskajianggaran.go.id</p>	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nasionalisme Adanya koordinasi antara penulis dan mentor merupakan salah satu cerminan dari nasionalisme kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Etika Publik Komunikasi yang baik antar rekan kerja merupakan cerminan dari nilai etika publik. Komitmen Mutu Menyediakan data dan juga infografis mengenai data-data postur APBN 	

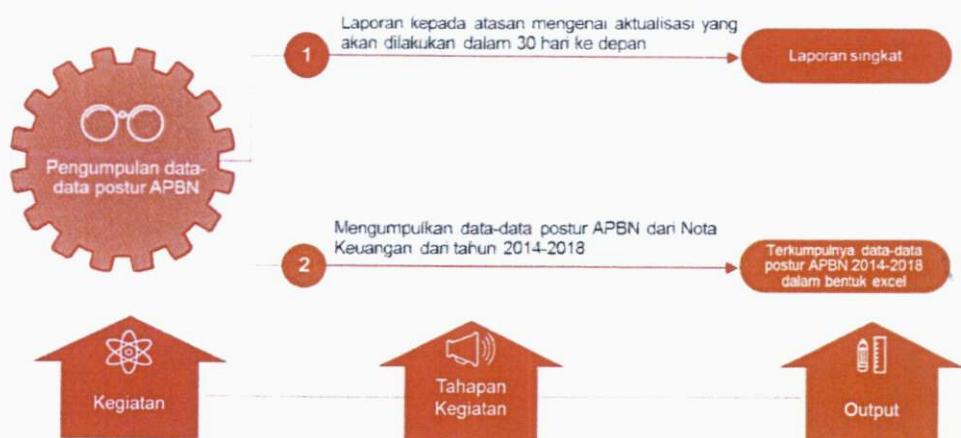
				<p>yang belum pernah ada sebelumnya pada website Pusat Kajian Anggaran merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi pembaca dan pengguna data-data APBN di lingkungan Pusat Kajian Anggaran.</p> <p>Peran dan Kedudukan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelayanan Publik Dengan tersedianya data-data postur APBN yang dapat diakses oleh anggota DPR RI dan masyarakat umum, tentunya hal ini sejalan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik.		
--	--	--	--	--	--	--

B. Deskripsi kegiatan :

1. Kegiatan 1

Yaitu pengumpulan data-data postur APBN. Kegiatan 1 dalam rangkaian aktualisasi ini adalah pengumpulan data-data postur APBN, kegiatan 1 terdiri atas dua tahapan kegiatan.

Gambar 5. Kegiatan 1 dari aktualisasi



Tabel 3. Keterkaitan Nilai-nilai dengan kegiatan aktualisasi

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan	Nilai Organisasi
1	Akuntabilitas	Pelayanan Publik	Akuntabel
2	Etika Publik		Profesional
3	Komitmen Mutu		Integritas

Tujuan dari pengumpulan data-data postur APBN ini adalah untuk memastikan bahwa data-data dari postur APBN yang akan dimasukan ke dalam website terdapat dalam Nota Keuangan dari tahun 2014-2018.

a) Tahapan Kegiatan :

Kegiatan ini terdiri atas dua tahapan yaitu:

- 1.1. Laporan kepada atasan mengenai aktualisasi yang akan dilakukan oleh penulis dalam kurun waktu 30 hari kedepan. Laporan ini berisikan tentang kegiatan yang akan dilakukan

penulis dan juga laporan tentang data-data postur APBN yang akan di tambahkan ke dalam website puskajianggaran.dpr.go.id.

Gambar 6. Laporan kepada atasan



- 1.2. Pengumpulan data, dalam kegiatan aktualisasi ini penulis akan mengumpulkan data-data dari Nota Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan data set Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 terkait dengan data-data postur APBN. Data-data dalam postur APBN terdiri atas (1) Ringkasan APBN; (2) Asumsi Dasar Ekonomi Makro; (3) Pendapatan Negara; (4) Belanja Pemerintah Pusat; (5) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa; dan (6) Pembiayaan Anggaran. Nota Keuangan dapat di download pada website Kementerian Keuangan dengan akses <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/>.

b) Keterkaitan substansi mata pelatihan

1) Akuntabilitas

Adanya laporan kepada atasan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari penulis atas aktualisasi yang akan dikerjakan.

2) Etika Publik

Salah satu bentuk dukungan keahlian seorang analis APBN dalam kegiatan ini adalah mengumpulkan data-data terkait postur APBN yang nantinya data tersebut akan diolah.

3) Komitmen Mutu

Pengumpulan data-data postur APBN belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga hal ini merupakan suatu pembaruan pada website Pusat Kajian Anggaran.

4) Pelayanan Publik

Mengumpulkan data-data postur APBN, sehingga data-data tersebut dapat ditampilkan pada website puskajianggaran.dpr.go.id dan data-data postur APBN tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

c) Penguatan Nilai Organisasi

1) Akuntabel

Nilai akuntabel dalam nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sejalan dengan nilai ANEKA yaitu adanya laporan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ASN.

2) Profesional

Malalui kegiatan pengumpulan data-data postur APBN ini Analis APBN bekerja sesuai dengan kompetensi serta berusaha untuk menyediakan informasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi Analis APBN sebagai *supporting system* anggota DPR RI.

3) Integritas

Integritas berkaitan dengan konsistensi dalam setiap ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh ASN dalam bekerja. Melalui tahapan kegiatan ini penulis berupaya agar data-data postur APBN dapat dilihat dan dipergunakan oleh Anggota DPR RI dan juga masyarakat umum.

2. Kegiatan 2

Yaitu pengolahan data-data postur APBN yang akan dimasukan ke dalam website.

Kegiatan 2 dalam rangkaian aktualisasi ini adalah pengumpulan data-data postur APBN, kegiatan 2 terdiri atas empat tahapan kegiatan.

Gambar 7. Kegiatan 2 dari aktualisasi



Tabel 4. Keterkaitan Nilai-nilai dengan kegiatan aktualisasi

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan	Nilai Organisasi
1	Akuntabilitas	Pelayanan Publik	Akuntabel
2	Etika Publik		Profesional
3	Komitmen Mutu		Integritas

Tujuan dari pengolahan data-data postur APBN ini adalah untuk mengklasifikasikan atau mengelompokan data-data postur APBN.

a) Tahapan Kegiatan :

Tahapan kegiatan dari pengelahan data ini terdiri atas empat tahapan yaitu:

2.1. Melakukan diskusi bersama dengan mentor terkait dengan pengelompokan data-data postur APBN. Hal ini bertujuan agar mentor mengetahui kegiatan penulis dan juga penulis akan mendapat masukan dari mentor terkait data-data yang akan disajikan dalam website Pusat Kajian Anggaran.

2.2. Mengelompokan atau mengklasifikasikan data-data postur APBN kedalam lima bagian yaitu :

- 1) Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang terdiri atas: pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga SPN 3 bulan, nilai tukar, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak, dan lifting gas;
- 2) Pendapatan Negara terdiri atas: PPh migas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, bea masuk, bea keluar, sumber daya alam, PNBP lainnya, BLU, dan hibah;
- 3) Transfer Ke Daerah Dan Desa terdiri atas: dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan, serta dana desa;
- 4) Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi,

perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial; serta

- 5) Pembiayaan Anggaran terdiri atas: pinjaman, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, dan pembiayaan lainnya.

Pengelompokan ini bertujuan agar data-data postur APBN dapat mudah dipahami oleh pembaca.

2.3. Mengubah data-data postur APBN yang sudah dikelompokan menjadi lima bagian tersebut dari tabel excel yang berupa angka menjadi grafik yang lebih menarik dan mudah untuk dilihat.

2.4. Membuat analisis analisis singkat dalam bentuk infografis tentang APBN selama lima tahun terakhir, hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan infoemasi kepada pembaca bagaimana perkembangan APBN selama lima tahun terakhir.

b) Keterkaitan substansi mata pelatihan

- 1) Akuntabilitas

Pengolahan data-data APBN merupakan salah satu tugas dan fungsi analis APBN sehingga kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Analis APBN.

- 2) Etika Publik

Diskusi dengan mentor membuat adanya interaksi antara penulis dan mentor, interaksi atau komunikasi yang baik dengan mentor merupakan nilai dasar bagi seorang ASN.

3) Komitmen Mutu

Menyediakan informasi tentang data-data postur APBN merupakan bagian dari komitmen penulis dalam menyediakan informasi tentang APBN dengan menambahkan konten data pada website Pusat Kajian Anggaran.

4) Pelayanan Publik

Mengolah data dalam bentuk grafik dan membuat analisis singkat dalam bentuk infografis sehingga data-data postur APBN tersebut dapat lebih mudah untuk dibaca merupakan salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

c) Penguatan Nilai Organisasi

1) Akuntabel

Pengolahan data APBN merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Analis APBN dalam menyediakan informasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

2) Profesional

Malalui kegiatan pengolahan data-data postur APBN ini Analis APBN bekerja sesuai dengan kompetensi serta berusaha untuk menyediakan informasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi Analis APBN sebagai *supporting system* anggota DPR RI.

3) Integritas

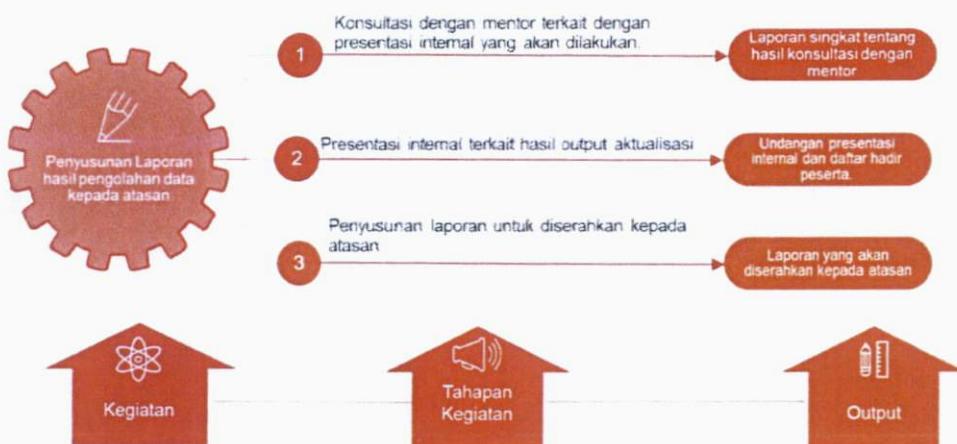
Melalui pengolahan data-data postur APBN ke dalam lima bagian ini penulis berupaya agar data-data postur APBN dapat dilihat dan dipergunakan oleh Anggota DPR RI dan juga masyarakat umum.

3. Kegiatan 3

Yaitu penyusunan laporan hasil pengolahan data kepada atasan.

Kegiatan tiga dalam rangkaian aktualisasi ini adalah pengumpulan data-data postur APBN, kegiatan 3 terdiri atas tiga tahapan kegiatan.

Gambar 8. Kegiatan 3 dari aktualisasi



Tabel 5. Keterkaitan Nilai-nilai dengan kegiatan aktualisasi

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan	Nilai Organisai
1	Akuntabilitas	Pelayanan Publik	Akuntabel
2	Etika Publik		Profesional
3	Nasionalisme		Integritas

Kegiatan ini bertujuan agar pimpinan mengetahui kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan oleh penulis dan juga merupakan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan Latsar CPNS yang telah dilakukan oleh penulis.

a) Tahapan Kegiatan :

Tahapan kegiatan dari penyusunan laporan ini terdiri atas tiga tahapan yaitu:

- 3.2. Melakukan diskusi bersama dengan mentor terkait dengan presentasi internal mengenai hasil output. Hal ini bertujuan agar mentor mengetahui sejauh mana output yang telah dikerjakan oleh penulis dan juga hal-hal apa saja yang akan dipresentasikan oleh penulis.
- 3.3. Presentasi internal terkait hasil output aktualisasi, tujuan dari kegiatan ini adalah sosialisasi kepada seluruh analis APBN terkait hasil akhir dari kegiatan aktualisasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara penulis melakukan presentasi dihadapan seluruh analis APBN di ruang rapat Pusat Kajian Anggaran, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendengarkan kritik dan saran dari seluruh analis APBN terkait grafik dan infografis yang nantinya akan di tampilkan pada website puskajianggaran.dpr.go.id.

Gambar 9. Kegiatan Presentasi internal



- 3.4. Penyusunan laporan untuk diserahkan kepada atasan, laporan kegiatan aktualisasi kepada atasan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penulis kepada atasan atas

aktualisasi yang telah dikerjakan selama ini. Laporan ini berisikan tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis dalam membuat aktualisasi, yaitu mulai dari pengumpulan data dan pengolahan data hingga menjadi grafik dan infografis yang siap untuk ditampilkan pada website puskajianggaran.dpr.go.id.

b) Keterkaitan substansi mata pelatihan

1) Akuntabilitas

Laporan pertanggung jawaban penulis kepada atasan dan juga presentasi yang dilakukan penulis dihadapan para Analis APBN di lingkungan Pusat Kajian Anggaran merupakan salah satu bentuk bukti atas pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilakukan selama kegiatan aktualisasi.

2) Etika Publik

Adanya konsultasi dengan mentor merupakan salah satu nilai yang diterapkan dalam tahapan kegiatan ini, konsultasi ini tentunya bertujuan untuk menjaga komunikasi dan juga bentuk kerja sama antara penulis dengan mentor.

3) Nasionalisme

Adanya komunikasi dan kerjasama antara penulis dengan atasan dan juga mentor merupakan salah satu penerapan nilai nasionalisme dalam bekerja.

4) Pelayanan Publik

Laporan kepada atasan terkait pemutakhiran data-data postur APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id merupakan salah satu upaya agar data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

c) Penguatan Nilai Organisasi

1) Akuntabel

Laporan kepada atasan atas kegiatan yang telah dilakukan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Analis APBN dalam menyediakan informasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

2) Profesional

Adanya laporan kepada atasan atas kegiatan aktualisasi berupa pemutakhiran data-data postur APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id, hal ini untuk menunjukkan bahwa Analis APBN bekerja sesuai dengan kompetensi.

3) Integritas

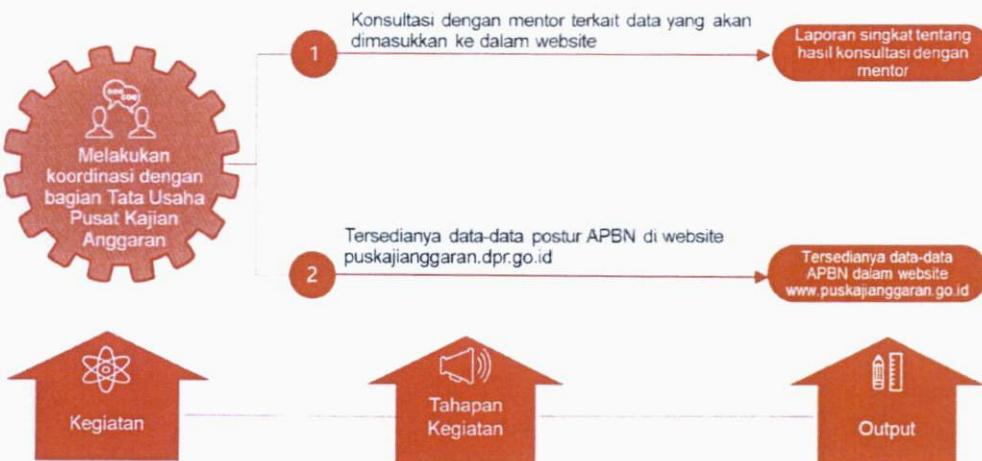
Melalui tahapan kegiatan ini penulis berupaya agar data-data postur APBN dapat dilihat dan dipergunakan oleh Anggota DPR RI dan juga masyarakat umum.

4. Kegiatan 4

Yaitu memasukkan data-data postur APBN ke dalam website puskajianggaran.dpr.go.id.

Kegiatan empat dalam rangkaian aktualisasi ini adalah memasukkan data-data postur APBN ke dalam website puskajianggaran.dpr.go.id, dalam kegiatan empat terdiri atas tiga tahapan kegiatan.

Gambar 10. Kegiatan 4 dari aktualisasi



Tabel 6. Keterkaitan Nilai-nilai dengan kegiatan aktualisasi

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan	Nilai Organisasi
1	Nasionalisme	Pelayanan Publik	Akuntabel
2	Etika Publik		Profesional
3	Komitmen Mutu		Integritas

Rangkaian kegiatan terakhir dari aktualisasi ini adalah memasukkan data-data postur APBN ke dalam website puskajianggaran.dpr.go.id. Data-data postur APBN ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi anggota DPR RI maupun bagi masyarakat umum karena para pengguna dapat mengetahui informasi secara garis besar tentang postur APBN dan juga bagaimana perkembangan APBN selama lima tahun terakhir.

a) Tahapan Kegiatan :

Tahapan kegiatan empat ini terdiri atas dua tahapan yaitu:

- 4.2. Melakukan diskusi bersama dengan mentor terkait dengan data-data psotur APBN yang akan dimasukkan ke dalam

website puskajianggaran.dpr.go.id. pada tahapan ini penulis meminta bantuan kepada mentor untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam website, karena mentor memiliki akses sebagai super pada portal sehingga mentor dapat menambahkan data pada menu data indikator pada website puskajianggaran.dpr.go.id.

4.3. Pada tahapan kegiatan terakhir ini, penulis telah memasukkan data-data postur APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id, sehingga data-data postur APBN dapat diakses melalui website. Hal ini tentunya bertujuan agar data postur APBN dapat dilihat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Anggota DPR RI dan juga oleh masyarakat umum.

b) Keterkaitan substansi mata pelatihan

1) Nasionalisme

Adanya koordinasi antara penulis dengan mentor merupakan salah satu cerminan dari nasionalisme kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

2) Etika Publik

Komunikasi yang baik antar rekan kerja merupakan cerminan dari nilai etika publik.

3) Komitmen Mutu

Menyediakan data dan juga infografis mengenai data-data postur APBN yang belum pernah ada sebelumnya pada website Pusat Kajian Anggaran merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi pembaca dan pengguna data-data APBN di lingkungan Pusat Kajian Anggaran.

4) Pelayanan Publik

Dengan tersedianya data-data postur APBN yang dapat diakses oleh anggota DPR RI dan masyarakat umum, tentunya hal ini sejalan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik.

c) Penguatan Nilai Organisasi

1) Akuntabel

Penyajian data APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Analis APBN dalam menyediakan informasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

2) Profesional

Malalui kegiatan penyajian data APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id ini Analis APBN bekerja sesuai dengan kompetensi serta berusaha untuk menyediakan informasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi Analis APBN sebagai *supporting system* anggota DPR RI.

3) Integritas

Dengan tersajinya data-data postur APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id menunjukan salah satu upaya agar data-data postur APBN dapat diakses secara terbuka dan transparan oleh masyarakat umum.

C. STAKEHOLDER

a. Internal

- ✓ Staf Pusat Kajian Anggaran Badan Kehlian DPR RI

b. Ekternal

- ✓ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- ✓ Masyarakat Umum

D. ANALISIS DAMPAK

Tabel 7. Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan

No.	Tahapan Kegiatan	Dampak Jika Tidak Dilakukan
1	Pengumpulan data-data postur APBN	Maka data-data APBN tidak akan terkumpul.
2	Pengolahan data-data postur APBN yang akan dimasukan ke dalam website	Maka tampilan data tidak menarik dan tidak terklasifikasi.
3	Penyusunan Laporan hasil pengolahan data kepada atasan	Maka pimpinan tidak akan tahu tentang kegiatan yang dilakukan.
4	Melakukan koordinasi dengan bagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran	Maka data-data APBN tidak dapat ditambahkan ke dalam konten website dan masyarakat tidak tahu tentang data postur APBN secara berkala.

E. TIME TABLE KEGIATAN

Tabel 8. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	JULI										AGUSTUS															SEPTEMBER								
	Tanggal										Tanggal															Tanggal								
	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	
Pengumpulan data																																		
a) Laporan kepada atasan	■																																	
b) Pengumpulan data postur APBN		■■■■■																																
Pengolahan data																																		
a) Konsultasi kepada mentor																					■													
b) Pengelompokan data postur APBN												■■■																						
c) Pengolahan data ke dalam grafik																																		
d) Pembuatan infografis																																		
Penyusunan Laporan																																		
a) Konsultasi kepada mentor																											■							
b) Presentasi internal untuk output																																		
c) Penyusunan laporan																																		
Koordinasi dengan bagian Tata Usaha																																		
a) Konsultasi kepada mentor																												■						
b) Koordinasi ke bagian TU																												■						
c) Memasukan data postur APBN ke website																												■						

BAGIAN III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemutakhiran data-data postur APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id merupakan pelaksanaan dari rancangan aktualisasi yang telah dilaksanakan selama 30 hari dengan melalui beberapa proses. Proses yang dilakukan dimulai dari memilih isu strategis dari beberapa isu yang telah dipilih melalui teknik USG. Setelah terpilihnya isu strategis maka rancangan aktualisasi ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, sehingga pada akhirnya didapatkan output berupa grafik dan infografis dari data-data postur APBN yang kemudian ditambahkan ke dalam data indikator pada website puskajianggaran.dpr.go.id.

Dengan adanya data-data postur APBN pada website puskajianggaran.dpr.go.id diharapkan dapat memberikan informasi terkait data-data postur APBN kepada anggota DPR RI dan juga masyarakat umum.

B. SARAN

Karena data-data postur APBN memiliki manfaat tidak hanya bagi Anggota DPR namun juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, diharapkan kedepannya dapat terus dilanjutkan. Dan diharapkan kedepannya data-data postur APBN dapat terus di perbarui setiap tahun. Sehingga data-data postur APBN selalu dapat di pantau setiap tahunnya baik oleh anggota DPR maupun oleh masyarakat umum.

DAFTAR ISTILAH

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen dari postur APBN. Asumsi Dasar Ekonomi Makro terdiri atas 7 indikator utama yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, (2) inflasi, (3) suku bunga SPN 3 bulan, (4) nilai tukar rupiah terhadap dolar US, (5) harga minyak mentah Indonesia, (6) lifting minyak Indonesia, (7) kifting gas.

Belanja Negara

Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara dalam APBN dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Nota Keuangan

Nota yang menjelaskan rancangan Anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pembiayaan

Pendapatan Negara

Semua penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Transfer ke Daerah

Bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiscal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

LAMPIRAN

LAMPIRAN TAHAPAN KEGIATAN 1

- 1.1. Laporan singkat hasil pertemuan dengan atasan;
- 1.2. Data-data postur APBN 2014-2018

Tahapan Kegiatan 1.1



Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715730 Faks. (021) 5715933 E-mail: puskaanggaran.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT KONSULTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Waktu/Tanggal	: Selasa, 23 Juli 2019
Pukul	: 09.00 s/d 11.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Acara	: Konsultasi Tema, Kousep, Serti Mekanisme Distribusi Produk Infografis Ringkasan Ekselutif APBN dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran.
Pimpinan	: Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si.

1. PEMBUKAAN

Agenda konsultasi pada Selasa, 23 Juli 2019 dimulai pada pukul 09.00 WIB. Konsultasi ini membahas tentang rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan Diania Liana selaku calon Analis APBN Ahli Pertama hingga akhir Agustus 2019 mendatang. Konsultasi ini dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran, Dr.Asep Ahmad Saefullah,S.E.,M.Si. Secara garis besar, konsultasi ini membahas tentang tema dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan pada rangkaian kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan oleh calon Analis APBN.

2. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diskusi serta arahan koordinator bidang, maka topik aktualisasi yang akan diangkat adalah pemutakhiran data-data postur APBN pada website puskaanggaran.dpr.go.id. Pemutakhiran data ini bertujuan agar data-data postur APBN dapat tersedia pada website Pusat Kajian Anggaran dan masingnya dapat menjadi salah satu sumber informasi baik bagi anggota DPR RI maupun masyarakat umum. Sedangkan untuk jadwal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Juli 2019		Agustus 2019		
		Week 4	Week 5	Week 2	Week 3	Week 4
1	Pengumpulan data-data APBN					
2	Melakukan klasifikasi data-data APBN yang akan dimasukan ke dalam website.					
3	Koordinasi dengan bagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran.					
4	Penyusunan laporan kegiatan.					

3. PENUTUP

Decikianlah acara konsultasi aktualisasi Diania Liana dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, rapat ditutup pukul 11.00 wib.

Mengetahui,
KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 003

Tahapan Kegiatan 1.2

Data Postur APBN pada Nota Keuangan

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2010 – 2015

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
					APBNP	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	6,2	6,5	6,3	5,8	5,5	5,8
Inflasi (% yoy)	6,96	3,79	4,30	8,58	5,30	4,40
Nilai tukar rupiah (Rp/US\$)	9.087	8.776	9.384	10.160	11.000	11.900
Suku bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%) ^{††}	6,57	4,84	3,19	4,42	6,00	6,00
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	70,4	111,5	112,7	105,9	105,0	105,0
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	954	809	801	823	818	900
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) ^{†††}	–	–	–	1.213	1.224	1.248

^{††} Sebelum tahun 2011 menggunakan suku bunga SBI 3 bulan

^{†††} Asumsi digunakan sejak tahun 2013

INDIKATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
					APBNP	APBN
Tingkat Pengangguran (%)	7,1	6,6	6,1	6,2	5,6 – 5,9	5,5 – 5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	13,3	12,4	11,7	11,5	9,0 – 10,5	9,0 – 10,0

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA, 2010 – 2015
(miliar rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
I. Pendapatan Dalam Negeri	992.248,5	1.205.345,7	1.332.322,9	1.432.058,6	1.633.053,4	1.790.332,6
1. Penerimaan Perpajakan	723.306,7	873.873,9	980.318,1	1.077.306,7	1.246.107,0	1.379.991,6
a. Pendapatan Pajak dalam Negeri	694.392,1	819.752,4	930.861,8	1.029.850,1	1.189.826,6	1.328.487,8
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	152.045,5	131.121,7	105.080,6	506.442,8	560.806,2	644.306,1
a) Pendapatan PPn Migas	38.872,7	73.095,9	82.160,9	88.747,4	83.869,8	86.768,6
b) Pendapatan PPn Nonmigas	208.172,8	358.026,2	381.008,8	417.695,3	485.076,9	555.687,5
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	230.664,9	275.800,1	337.584,6	384.713,5	475.587,2	524.972,2
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28.580,6	29.893,2	28.078,9	25.304,6	21.742,9	26.584,1
4) Pendapatan BPHTB	8.026,4	(6,9)	-	-	-	-
5) Pendapatan Cukai	66.165,0	77.610,0	97.127,0	108.452,1	117.450,2	126.746,3
6) Pendapatan Pajak Lainnya	3.908,8	3.928,2	4.210,9	4.937,1	5.179,6	5.589,1
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	28.914,5	54.121,5	49.056,3	47.456,6	36.280,4	51.503,8
1) Pendapatan Bina Maritim	20.016,8	25.263,0	28.418,4	31.621,3	35.696,0	37.203,9
2) Pendapatan Bina Kelautan	8.869,7	28.820,9	21.227,0	15.835,4	20.604,4	14.299,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	268.641,9	331.471,8	351.804,7	354.751,9	386.946,4	410.341,0
a. Penerimaan SDA	168.825,4	213.823,3	225.844,0	226.106,2	241.114,6	254.270,5
1) Penerimaan SDA Migas	152.033,2	193.490,6	205.823,3	203.629,4	211.068,2	224.263,1
a) Pendapatan Migas Bumir	111.814,0	141.303,5	141.207,0	135.329,2	154.750,4	159.342,3
b) Pendapatan Gas alam	40.018,3	52.187,1	61.106,4	68.300,2	50.917,8	53.920,8
2) Penerimaan SDA Non-Migas	16.099,2	20.322,8	20.020,2	22.776,8	26.110,4	30.007,4
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	12.646,8	16.356,8	15.877,4	18.620,5	23.294,7	24.599,7
b) Pendapatan Kehutanan	3.009,7	3.216,3	3.088,3	3.060,4	5.017,0	4.574,0
c) Pendapatan Perikanan	92,0	183,8	213,8	229,4	250,0	250,0
d) Pendapatan Pangan Bahan	343,8	502,7	739,0	866,6	530,7	583,7
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	30.096,9	28.184,0	30.798,0	34.025,6	40.000,0	44.000,0
c. PNBP Lainnya	59.428,6	69.360,5	73.458,5	69.671,9	84.968,4	86.823,7
d. Pendapatan BIU	10.390,8	20.104,0	21.704,3	24.648,2	20.863,4	22.246,8
II. Penerimaan Hibah	3.023,0	5.253,9	5.786,7	6.832,5	2.325,1	3.256,3
Jumlah	995.271,5	1.210.599,7	1.338.109,6	1.438.891,1	1.635.378,3	1.793.388,9

* Sebelum tahun 2013 disebut pendapatan berambalan umum

TABEL 9
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2014 - 2019
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	APBN
01	PELAYANAN UMUM	214.305,3	238.173,5	275.123,4	307.147,2	429.917,7	517.341,7
02	PERTAHANAN	86.344,1	101.692,5	98.248,9	117.506,6	107.578,1	108.428,7
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	69.328,3	94.526,0	113.349,7	135.748,1	131.901,3	142.972,4
04	EKONOMI	495.685,8	353.199,1	288.344,9	307.787,5	355.116,8	389.600,0
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	7.922,2	10.544,5	8.941,5	10.613,7	15.210,2	17.764,1
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	24.806,9	35.938,6	27.816,9	27.277,4	29.919,0	26.516,2
07	KESEHATAN	49.379,2	51.426,3	59.639,0	57.225,1	64.300,7	62.758,3
08	PARIWISATA	1.862,0	3.066,8	4.379,5	5.770,6	7.163,0	5.324,6
09	AGAMA	7.286,2	8.589,5	8.463,2	8.870,4	9.086,2	10.143,0
10	PENDIDIKAN	126.314,7	146.134,8	131.974,0	138.507,3	141.893,6	152.690,0
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	120.342,4	140.012,1	137.737,3	148.905,5	161.543,8	200.800,5
Jumlah		1.203.577,2	1.183.303,7	1.154.018,2	1.265.359,4	1.453.630,2	1.634.339,5

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 15
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2014 – 2019
(miliar rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	APBN
I. Transfer Ke Daerah						
A. Dana Perimbangan						
1. Dana Transfer Umum						
a. Dana Bagi Hasil						
1) Pajak	553.703,1	602.373,4	663.577,5	682.225,8	703.622,3	756.772,5
2) Sumber Daya Alam	555.747,4	583.045,9	639.765,7	654.482,5	674.062,7	724.592,6
b. Dana Alokasi Umum	445.158,3	430.941,2	475.895,8	486.814,5	497.366,7	524.223,8
2. Dana Transfer Khusus	103.939,0	78.053,4	90.534,9	88.232,2	93.877,1	106.350,2
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	41.937,6	35.771,4	50.636,2	56.590,5	50.874,6	52.438,6
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	62.001,3	42.282,0	39.898,7	31.641,7	45.002,5	53.911,6
B. Dana Insentif Daerah	341.219,3	352.887,8	385.360,8	398.582,3	401.489,6	417.873,6
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Y	110.589,0	152.104,7	163.869,9	167.668,0	176.696,0	200.368,8
1. Dana Otonomi Khusus	31.894,5	54.877,2	75.207,5	92.104,2	59.314,4	69.326,7
a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat	78.694,6	97.227,5	88.662,4	105.563,8	117.381,6	131.042,1
b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	16.148,8	17.115,5	18.264,4	19.443,3	20.059,6	20.979,9
c. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	6.824,4	7.057,8	7.707,2	7.971,6	8.029,8	8.357,5
2. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	2.500,0	3.000,0	2.850,0	3.500,0	4.000,0	4.265,0
II. Dana Desa	419,1	547,5	547,5	800,0	1.000,0	1.200,0
Jumlah	573.703,1	623.139,6	710.256,9	741.992,4	763.622,3	826.772,5

TABEL 7
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010-2015
(miliar rupiah)

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
A. Pembayaran Dalam Negeri	96.118,5	148.748,0	198.622,5	243.199,7	254.932,0	269.709,7
I. Perbankan Dalam Negeri	22.189,3	48.927,9	62.703,1	34.174,1	5.398,5	4.467,5
1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman (RDP)	4.841,4	7.510,9	6.533,0	4.174,1	4.398,5	4.467,5
2. Rekening KUN untuk Pembayaran Kredit Investasi Pemerintah	-	6.612,9	-	-	-	-
3. SLM	17.347,9	40.309,0	70.170,0	39.000,0	1.000,0	-
II. Non Perbankan Dalam Negeri	73.929,2	99.820,1	135.919,4	209.029,7	249.533,5	265.242,2
1. Privatisasi	3.698,7	125,0	138,3	567	-	-
2. Hasil Pengelolaan Aset	1.139,5	1.129,0	1.039,7	1.413,5	1.000,0	350,0
3. Surat Berharga Negara (neto)	91.402,6	149.804,4	159.794,0	224.072,5	264.983,7	277.040,8
4. Pinjaman Dalam Negeri	393,6	697,4	799,7	474,5	2.178,0	1.021,2
5. Dana Investasi Pemerintah	(12.299,0)	(19.643,0)	(18.822,0)	(11.915,1)	(9.307,0)	(12.647,0)
a. Penerimaan Kembali Investasi	-	-	-	-	-	778,3
b. Investasi Pemerintah	(927,5)	(1.559,0)	(320,0)	-	-	-
c. PMN	(6.098,6)	(33.512,8)	(8.313,5)	(3.097,1)	(1.397,0)	(7.319,2)
d. Dana Bergulir	(5.293,0)	(8.798,1)	(7.045,4)	(3.035,8)	(4.000,0)	(6.106,3)
e. Dibayi Investasi dan Rangka Pengambilalihan PT Inalum	-	-	-	(4.382,0)	-	-
f. Kewajiban Pembiayaan	-	-	-	(760,0)	(694,0)	(1.131,6)
g. Pinjaman kepada PT PLN	(7.500,0)	-	-	-	-	-
h. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(1.000,0)	(2.017,7)	(2.016,0)	(5.000,0)	-	-
i. Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-	-	-	(8.359,1)	-	-
B. Pembayaran Luar Negeri (neto)	(4.566,5)	(17.709,2)	(23.464,4)	(5.805,2)	(13.437,7)	(23.815,0)
I. Penerimaan Pinjaman Luar Negeri (bruto)	54.794,8	33.747,2	31.403,5	53.279,8	54.129,6	47.037,1
1. Pinjaman Program	28.074,6	15.590,1	15.000,5	18.420,4	16.893,0	2.140,0
2. Pinjaman Proyek	25.820,1	18.490,0	16.400,0	36.853,4	37.200,0	39.897,0
II. Penerusan Pinjaman	(8.728,8)	(4.223,8)	(3.753,0)	(3.880,6)	(3.407,4)	(4.319,4)
III. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(50.632,5)	(47.322,5)	(51.114,8)	(57.204,4)	(64.159,9)	(66.532,8)
Jumlah	91.552,0	130.048,9	175.158,2	237.394,6	241.494,3	245.804,7

TABEL 16
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2014 – 2019
(miliar rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	APBN
A. Pembiayaan Utang						
I. Surat Berharga Negara (Neto)	255.732,4	380.916,1	403.009,3	429.076,6	387.361,0	359.250,6
II. Pinjaman (Neto)	264.628,9 (8.896,6)	362.257,0 18.659,1 (4.250,1)	407.259,4 832,4 (4.250,1)	441.826,3 (12.749,8)	388.010,8 (6.498)	388.957,9 (29.707,3)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	950,0	832,4	1.051,6	648,3	3.137,9	482,4
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(9.846,5)	17.826,7	(5.301,6)	(13.398,1)	(3.787,7)	(30.189,7)
B. Pembiayaan Investasi	(8.908,9)	(39.654,8)	(89.079,8)	(59.754,1)	(65.740,1)	(75.900,3)
I. Investasi Kepada BUMN	(3.000,0)	(64.528,6)	(50.521,0)	(6.379,3)	(3.600,0)	(17.800,0)
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(1.000,0)	(7.128,3)	(10.827,9)	(3.200,0)	(2.500,0)	(2.500,0)
III. Investasi Kepada BLU	(3.500,0)	(6.856,3)	(25.295,7)	(48.150,6)	(57.433,2)	(53.190,0)
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(1.412,5)	(276,5)	(3.837,2)	(2.024,2)	(2.207,2)	(2.410,3)
V. Penerimaan Kembali Investasi	3,6	19.134,9	1.401,9	-	-	-
C. Pemberian Pinjaman	2.493,5	1.504,9	1.662,8	(2.052,4)	(6.456,4)	(2.350,0)
I. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	2.493,5	2.278,3	1.662,8	(2.052,4)	(6.456,4)	(2.350,0)
II. Cadangan Pemberian Pinjaman	-	(773,4)	-	-	-	-
D. Kewajiban Penjaminan	(964,1)	-	(651,7)	(1.005,4)	(1.121,3)	-
I. Penugasan Perekatana Pembangunan Infrastruktur Nasional	(964,1)	-	(651,7)	(802,4)	(1.121,3)	-
II. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	-	-	-	(203,0)	-	-
E. Pembiayaan Lainnya	540,0	341,7	19.562,8	359,1	183,0	15.000,0
I. Saldo Anggaran Lebih	-	-	19.011,10	-	-	-
II. Hasil Pengelolaan Aset	540,0	341,7	551,7	359,1	183,0	15.000,0
Jumlah	248.892,8	323.108,0	334.503,3	366.623,8	314.226,0	296.000,2

LAMPIRAN TAHAPAN KEGIATAN 2

- 2.1. Laporan singkat hasil konsultasi dengan mentor;
- 2.2. Data-data postur APBN yang telah dikelompokkan ke dalam 5 bagian;
- 2.3. Grafik dari data-data postur APBN;
- 2.4. Infografis.

Tahapan Kegiatan 2.1



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari,tanggal : Rabu, 14 Agustus 2019
Pukul : 15.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran
Kegaitan : Pembahasan tentang data-data postur APBN yang akan dikumpulkan

I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan diskusi kepada mentor terkait pengelompokan data-data postur APBN. Berdasarkan arahan dari mentor maka penulis mengelompokan data-data postur APBN ke dalam lima bagian, yaitu:

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang terdiri atas: pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga SPN 3 bulan, nilai tukar, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak, dan lifting gas;
2. Pendapatan Negara terdiri atas: PPh migas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, bea masuk, bea keluar, sumber daya alam, PNBP lainnya, BLI, dan hibah;
3. Transfer Ke Daerah Dan Desa terdiri atas: dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana otomasi khusus dan dana keistimewaan, serta dana desa;
4. Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial; serta
5. Pembiayaan Anggaran terdiri atas: pinjaman, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, dan pembiayaan lainnya.

Data-data postur APBN ini kemudian akan diolah ke dalam bentuk excel dan akan menjadi 5 bagian excel, selain itu nantinya juga akan ada bentuk analisis singkat dalam bentuk infografis.

II. PENUTUP

Konsultasi ini ditutup pada pukul 16.00 WIB

Jakarta, 14 Agustus 2019

Dwi Resti Pratiwi

Tahapan Kegiatan 2.2

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

PREDIKSI	TAHUN	PERUMBUHAN EKONOMI (% yoy)	INFLASI (% yoy)	SUKU BUNGA SPN 3 BULAN (%)	NILAI TUKAR (Rp/USS)	HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA (USD/barel)	LIFTING MINYAK (ribu barel per hari)	LIFTING GAS (ribu barel setara minyak per hari)
	2014	6,0	5,5	5,5	10.500	105	870	1.240
	2015	5,8	4,4	6,0	11.900	105	900	1.155
	2016	5,3	4,7	5,5	13.900	50	830	1.150
	2017	5,1	4,0	5,3	13.300	45	815	1.200
	2018	5,4	5,5	5,2	13.400	48	800	1.250
REALISASI	TAHUN	PERUMBUHAN EKONOMI (% yoy)	INFLASI (% yoy)	SUKU BUNGA SPN 3 BULAN (%)	NILAI TUKAR (Rp/USS)	HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA (USD/barel)	LIFTING MINYAK (ribu barel per hari)	LIFTING GAS (ribu barel setara minyak per hari)
	2014	5,1	6,36	5,83	11.878	97,0	794	1.224
	2015	4,8	3,35	5,97	13.392	49,2	778	1.195
	2016	5	3,02	5,66	13.307	40,2	829	1.180
	2017	5,1	3,60	5,00	13.384	51,2	804	1.142
	2018	5,2	3,13	4,97	14.247	67,5	778	1.145

PENDAPATAN NEGARA

ANGGARAN APBN	Tahun	PENDAPATAN PPH MIGAS	PENDAPATAN PPA NON MIGAS	PENDAPATAN PPN	PENDAPATAN N PBB	PENDAPATAN CUKAI	PENDAPATAN PPAJAK LAINNYA	PENDAPATAN ANBEA MASUK	PENDAPATAN N BEA KELUAR	PENDAPATAN AN SDA MINYAK	PENDAPATAN N SDA GAS ALAM	PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERA	PENDAPATAN N KEHUTANAN	PENDAPATAN PERIKANAN	PENDAPATAN ANPANAS BUMI	PENDAPATAN N BAGIAN LABA BUMN	PENDAPATAN N PNPB LAINNYA	PENDAPATAN BLU	PENERIMAAN NHIBAH	TOTAL
	2014	76.073,6	510.232,8	432.550,3	25.441,90	116.284,0	5.451,0	33.336,6	15.378,2	142.943,1	53.565,2	23.553,7	5.017,1	250,0	579,7	40.000,0	34.087,7	25.349,4	1400,0	1661.140,3
	2015	88.708,6	555.687,5	524.372,2	26.684,1	126.746,3	5.689,1	37.203,3	14.299,3	170.342,3	53.320,8	24.539,7	4.574,0	250,0	583,7	44.000,0	33.823,7	22.246,8	3.256,3	1.793.586,5
	2016	41.441,5	715.188,6	571.732,7	19.400,0	146.439,9	11.766,8	31.203,3	2.883,2	60.287,1	18.330,3	40.820,2	4.030,6	639,0	732,8	34.164,0	73.431,5	35.358,9	2.031,8	1.822.545,8
	2017	35.334,0	751.770,7	453.888,7	17.255,6	157.158,0	8.749,6	33.735,0	340,1	50.046,5	13.620,3	17.736,1	3.342,8	950,0	659,5	41.000,0	84.428,1	31.615,1	1.372,7	1.750.263,5
	2018	38.134,1	816.999,4	541.801,1	17.369,1	155.400,0	9.631,8	35.700,0	3.000,0	59.582,7	20.766,3	17.858,5	4.166,7	600,0	700,6	44.695,4	83.753,1	43.304,6	1.196,9	1.834.720,3

REALISASI APBN	Tahun	PENDAPATAN PPH MIGAS	PENDAPATAN PPA NON MIGAS	PENDAPATAN PPN	PENDAPATAN N PBB	PENDAPATAN CUKAI	PENDAPATAN PPAJAK LAINNYA	PENDAPATAN ANBEA MASUK	PENDAPATAN N BEA KELUAR	PENDAPATAN AN SDA MINYAK	PENDAPATAN N SDA GAS ALAM	PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERA	PENDAPATAN N KEHUTANAN	PENDAPATAN PERIKANAN	PENDAPATAN ANPANAS BUMI	PENDAPATAN N BAGIAN LABA BUMN	PENDAPATAN N PNPB LAINNYA	PENDAPATAN BLU	PENERIMAAN NHIBAH	TOTAL
	2014	87.445,7	459.735,2	409.181,6	23.476,20	118.085,5	6.233,4	32.313,1	11.329,0	139.174,3	77.701,8	19.300,4	3.593,3	216,4	755,5	40.314,4	81.746,8	23.681,0	5.034,5	1.550.490,7
	2015	49.671,6	552.636,6	423.710,8	23.250,0	144.641,3	5.568,3	31.212,8	3.721,1	47.381,4	30.853,0	17.583,0	4.156,5	73,3	882,7	31.643,7	81.651,4	35.315,5	11.973,0	1.508.020,0
	2016	36.098,6	621.064,2	412.219,5	19.449,2	143.525,0	8.104,3	32.472,1	2.996,6	31.440,0	12.645,7	15.716,8	3.757,0	362,1	892,3	31.139,2	117.995,4	41.945,9	8.981,7	1.546.884,2
	2017	50.315,8	501.543,6	480.724,6	16.770,3	153.288,1	6.738,5	35.066,2	4.147,4	58.203,0	23.633,9	23.763,2	4.101,3	431,0	933,0	43.304,2	108.834,6	47.345,4	11.623,8	1.657.440,5
	2018	64.693,1	695.277,3	537.267,3	13.444,3	153.588,6	6.629,5	33.116,7	6.765,1	101.466,1	41.302,6	30.313,7	4.760,4	448,8	2.260,6	45.060,5	128.574,0	55.059,1	15.564,3	1.943.615,0

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

ANGGARAN APBN	TAHUN	PELAYANAN UMUM	PERTAHANAN	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	EKONOMI	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	KESEHATAN	PARIWISATA	AGAMA	PENDIDIKAN	PERLINDUNGAN SOSIAL	TOTAL
		794.800,0	86.300,0	38.000,0	128.300,0	12.200,0	31.500,0	13.100,0	2.100,0	4.500,0	131.300,0	8.100,0	1.250.200,0
	2014	794.800,0	86.300,0	38.000,0	128.300,0	12.200,0	31.500,0	13.100,0	2.100,0	4.500,0	131.300,0	8.100,0	1.250.200,0
	2015	891.768,4	96.823,9	46.137,9	143.525,7	10.679,5	20.465,8	21.113,2	1.926,2	5.289,6	146.392,8	8.319,5	500.674,1
	2016	316.532,6	99.648,9	109.794,0	960.226,7	12.087,8	34.651,1	67.213,7	7.432,7	9.785,1	150.090,0	158.088,8	1.009.018,8
	2017	355.818,5	108.293,8	121.576,1	310.559,9	11.919,0	29.683,4	61.724,5	5.394,2	9.726,6	143.140,9	157.689,2	959.707,6
	2018	435.904,7	107.829,1	135.992,7	335.464,3	15.680,4	31.508,4	65.066,2	7.456,0	9.473,3	147.562,0	162.557,3	1.018.589,7

REALISASI APBN	TAHUN	PELAYANAN UMUM	PERTAHANAN	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	EKONOMI	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	KESEHATAN	PARIWISATA	AGAMA	PENDIDIKAN	PERLINDUNGAN SOSIAL	TOTAL
		214.305,3	86.344,1	69.328,3	495.685,8	7.922,2	24.806,9	49.379,2	1.862,0	7.286,2	126.314,7	120.342,4	1.203.577,1
	2014	214.305,3	86.344,1	69.328,3	495.685,8	7.922,2	24.806,9	49.379,2	1.862,0	7.286,2	126.314,7	120.342,4	1.203.577,1
	2015	238.173,5	101.892,5	94.526,0	353.199,1	10.544,5	35.930,6	51.426,3	3.066,8	8.589,5	146.134,8	140.012,1	1.183.303,7
	2016	275.129,4	98.248,9	113.349,7	288.344,9	8.941,5	27.816,9	59.639,0	4.379,5	8.463,2	131.974,0	137.737,3	1.154.018,3
	2017	307.147,2	117.506,6	135.748,1	307.787,5	10.613,7	27.277,4	57.225,1	5.770,6	8.870,4	138.507,3	148.905,5	1.265.359,4
	2018	375.196,1	106.892,3	143.305,8	382.420,9	13.709,6	32.198,0	61.869,7	10.700,0	9.379,0	145.941,7	173.771,6	1.455.324,7

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

ANGGARAN APBN	TAHUN	DANA PERIMBANGAN		DANA ALOKASI KHUSUS			DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN						TOTAL
		DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DANA INSENTIF DAERAH	DANA OTSUS PROV. PAPUA DAN PAPUA BARAT	DANA OTSUS PROV. ACEH	DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR	DANA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	DANA DESA	
	2014	51.787,2	61.924,5	341.219,3	33.000,0	86.560,8	1.387,8	6.824,4	6.824,4	2.500,0	523,9	-	592.552,3
	2015	50.568,7	77.123,8	352.887,8	35.820,7	102.746,6	1.664,5	7.057,8	7.057,8	2.500,0	547,5	9.066,2	647.041,4
	2016	51.523,1	54.614,1	385.360,8	85.453,6	123.477,0	5.000,0	7.707,2	7.707,2	1.800,0	547,5	46.982,1	770.173,3
	2017	58.576,5	34.216,9	410.839,3	58.342,2	115.105,0	7.500,0	8.022,6	8.022,6	3.500,0	800,0	60.000,0	764.925,1
	2018	56.684,0	32.541,4	401.489,6	62.436,3	123.451,8	8.500,0	8.029,8	8.029,8	4.000,0	1.000,0	60.000,0	766.162,7

REALISASI APBN	TAHUN	DANA PERIMBANGAN		DANA ALOKASI KHUSUS			DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN						TOTAL
		DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DANA INSENTIF DAERAH	DANA OTSUS PROV. PAPUA DAN PAPUA BARAT	DANA OTSUS PROV. ACEH	DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR	DANA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	DANA DESA	
	2014	41.937,6	62.001,3	341.219,3	31.894,5	78.694,6	1.387,8	6.824,4	6.824,4	2.500,0	419,1	-	573.703,0
	2015	35.771,4	42.282,0	352.887,8	54.877,2	97.227,5	1.664,5	7.057,8	7.057,8	3.000,0	547,5	20.766,2	623.139,7
	2016	50.636,2	39.898,7	385.360,8	75.207,5	88.662,40	5.000,0	7.707,2	7.707,2	2.850,0	547,5	46.679,3	710.256,8
	2017	56.590,5	31.641,7	398.582,3	62.104,2	105.563,8	7.500,0	7.971,6	7.971,6	3.500,0	800,0	59.766,6	741.992,3
	2018	48.617,4	45.086,7	401.489,6	58.149,3	115.300,3	8.230,8	8.029,8	8.029,8	4.000,0	1.000,0	59.859,4	757.793,1

PEMBIAYAAN ANGGARAN

ANGGARAN APBN	TAHUN	PEMBIAYAAN PERBANKAN DALAM NEGERI	PEMBIAYAAN NON PERBANKAN DALAM NEGERI	PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI (BRUTO)	PEMBAYARAN CICILAN POKOK	PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI	TOTAL
	2014	4.398,5	191.859,6	39.132,7	(58.810,0)	(1.226,3)	175.354,5
	2015	4.467,5	265.242,2	47.037,1	(66.532,8)	(4.319,4)	245.894,7

REALISASI APBN	TAHUN	PEMBIAYAAN PERBANKAN DALAM NEGERI	PEMBIAYAAN NON PERBANKAN DALAM NEGERI	PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI (BRUTO)	PEMBAYARAN CICILAN POKOK	PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI	TOTAL
	2014	4.999,1	256.245,9	52.574,7	(62.421,2)	(2.505,6)	248.892,8
	2015	4.854,7	303.003,0	83.821,3	(65.994,6)	(2.576,4)	323.108,0

ANGGARAN APBN	TAHUN	PEMBIAYAAN UTANG	PEMBIAYAAN INVESTASI	PEMBERIAN PINJAMAN	KEWAJIBAN PINJAMAN	PEMBIAYAAN LAINNYA	TOTAL
	2016	336.794,5	(62.611,2)	(411,3)	(918,0)	325,0	273.179,0
	2017	384.690,5	(47.488,9)	(6.409,7)	(924,1)	300,0	330.167,8
	2018	399.219,4	(65.654,3)	(6.690,1)	(1.121,3)	183,0	325.936,7

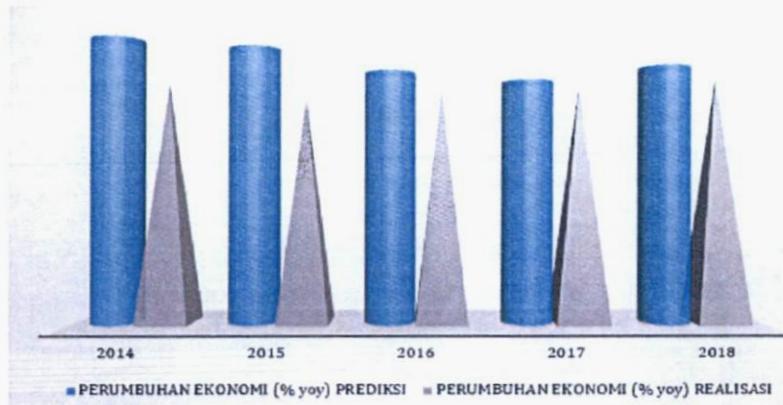
REALISASI APBN	TAHUN	PEMBIAYAAN UTANG	PEMBIAYAAN INVESTASI	PEMBERIAN PINJAMAN	KEWAJIBAN PINJAMAN	PEMBIAYAAN LAINNYA	TOTAL
	2016	403.009,3	(89.079,8)	1.662,8	(651,7)	19.562,8	334.503,4
	2017	429.076,6	(59.754,1)	(2.052,4)	(1.005,4)	359,1	366.623,8
	2018	372.028,9	(61.113,8)	(4.269,7)	(1.121,3)	168,6	305.692,7

Tahapan Kegiatan 2.3

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

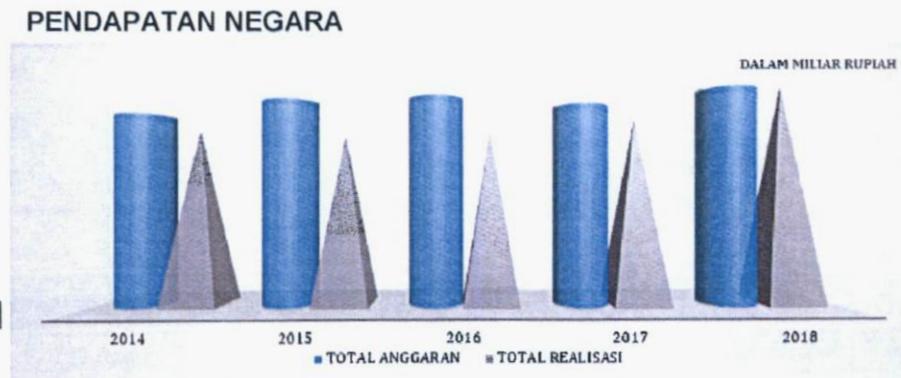
TAHUN	PERUMBUAHAN EKONOMI (% yoy)	
	PREDIKSI	REALISASI
2014	6,0	5,1
2015	5,8	4,8
2016	5,3	5,0
2017	5,1	5,1
2018	5,4	5,2

PILIHAN CHART	
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO	PERUMBUAHAN EKONOMI (% yoy)



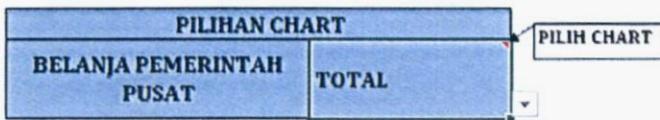
TAHUN	TOTAL	
	ANGGARAN	REALISASI
2014	1.667.140,9	1.550.490,7
2015	1.793.588,9	1.509.020,0
2016	1.822.545,8	1.546.884,2
2017	1.750.283,5	1.657.440,5
2018	1.894.720,3	1.943.675,0

PILIHAN CHART	
PENDAPATAN NEGARA	TOTAL



BELANJA PEMERINTAH PUSAT

TAHUN	TOTAL	
	ANGGARAN	REALISASI
2014	1.250.200,0	1.203.577,1
2015	500.674,1	1.183.303,7
2016	1.009.018,8	1.154.018,3
2017	959.707,6	1.265.359,4
2018	1.018.589,7	1.455.324,7



TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

TAHUN	DANA DESA	
	ANGGARAN	REALISASI
2014	-	-
2015	9.066,20	20.766,2
2016	46.982,10	46.679,3
2017	60.000,00	59.766,6
2018	60.000,00	59.859,4



PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN	TOTAL	
	ANGGARAN	REALISASI
2014	175.354,5	248.892,8
2015	245.894,7	323.108,0

PILHAN CHART

PEMBIAYAAN ANGGARAN	TOTAL
---------------------	-------

PILIH CHART



TAHUN	TOTAL	
	ANGGARAN	REALISASI
2016	273.179,0	334.503,4
2017	330.167,8	366.623,8
2018	325.936,7	305.692,7

PILHAN CHART

PEMBIAYAAN	TOTAL
------------	-------

PILIH CHART



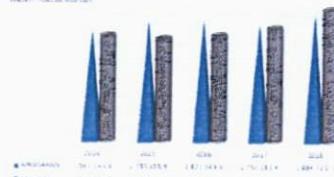
Tahapan kegiatan 2.4

Infografis postur APBN

POSTUR APBN 2014-2018 2014-2018

Pendapatan Negara dan Hibah

Dalam Rupiah Rupiah



Realisasi dan target pendapatan negara setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Namun terjadi perkurun pendapatan negara pada tahun 2015 diakibatkan terjadinya perlambatan pada pertumbuhan dunia, serta berbagai hambatan dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan negara. Meskipun demikian, pertumbuhan pendapatan pada tahun 2015-2018 Indonesia masih dihadapkan pada tantangan belum stabilnya kondisi pertumbuhan global dan harga-harga komoditas utama dunia serta belum optimistisnya rasio pertumbuhan perpajakan terhadap PDB (tan rasio)



Belanja Pemerintah Pusat

Dalam Rupiah Rupiah



Belanja pemerintah pusat disusun sejalan dengan strategi dan prioritas pembangunan nasional sebagai mesin pertumbuhan dan penciptaan kerja Pemerintah (RNP), serta memperkuat kesiagaan kerja Pemerintah dan pokok-pokok kebutuhan fisikal (KEM PRN). Pada tahun 2016, porti anggaran fungsi pelajaran umum dipotong, sedangkan porti anggaran dari fungsi pendidikan meningkat. Pada tahun 2017, peningkatan fungsi anggaran ekonomi sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.2/2015



Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Dalam Rupiah Rupiah



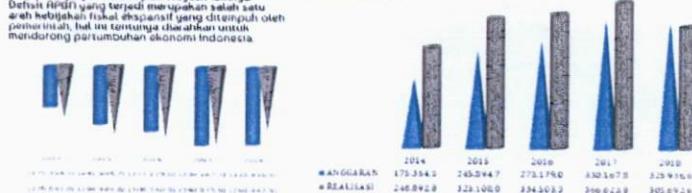
Pada tahun 2015 terdapat perubahan terkait anggaran transfer ke daerah dan dana desa, yaitu adanya penekokasian dana desa dan perbaikan pada pembentukan dana desa hal ini merupakan implikasi atas diterapkannya UU No. 14 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa ini berujuan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan dasar politik dan sosial antara daerah yang diberi dan yang menerima transfer ke daerah dan dana desa selalu mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir.



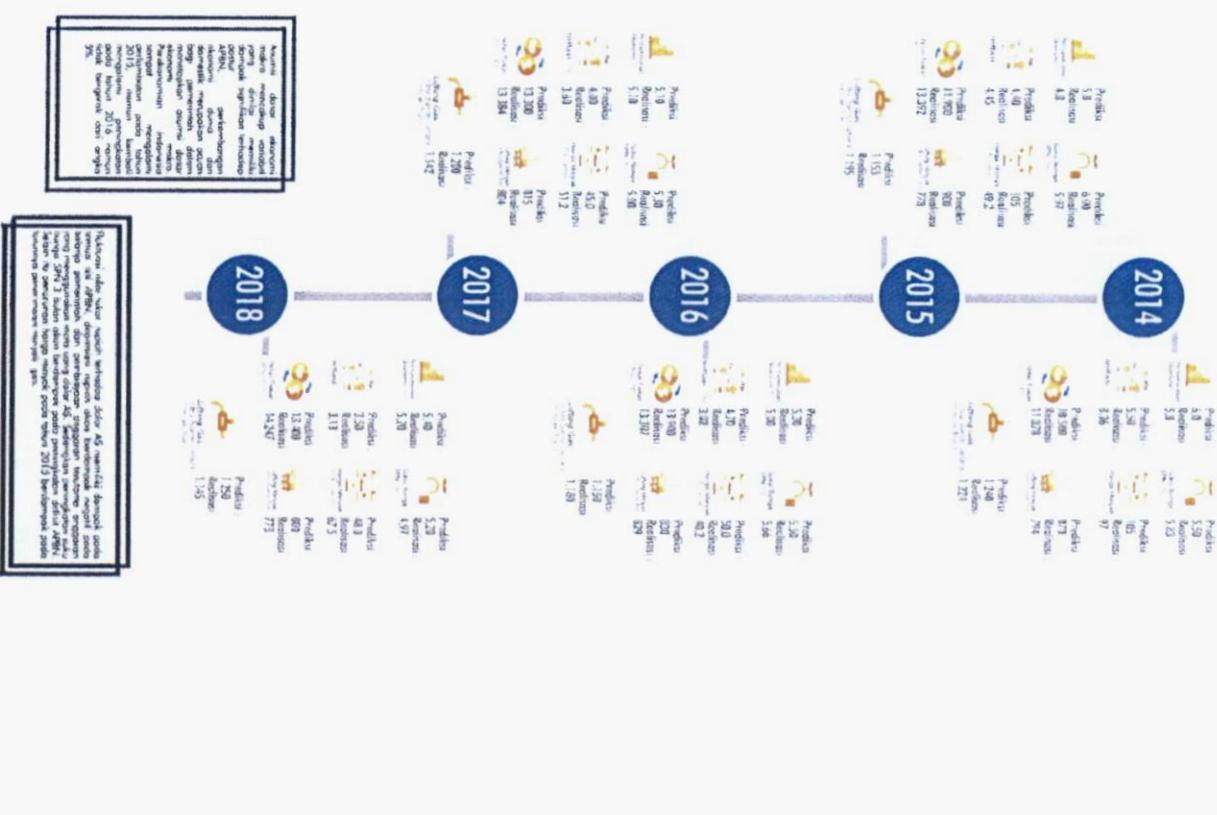
Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2014-2015 pembayaran anggaran terdiri pembayaran utang dan non utang. Namun pada tahun 2017 terjadi perubahan hal tersebut pembayaran anggaran menjadi pembayaran utang, pembayaran non utang berkurang dan pembayaran kewajiban pinjaman dan pembangunan lainnya. Defisit APBN yang terjadi merupakan salah satu akibat dari krisis ekspansi yang ditimbulkan oleh pertumbuhan, hal ini tentunya disebabkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam Rupiah Rupiah



Asumsi Dasar
Ekonomi Makro



LAMPIRAN TAHAPAN KEGIATAN 3

- 3.1. Laporan singkat hasil konsultasi dengan mentor;
- 3.2. Undangan untuk presentasi internal dan daftar hadir peserta;
- 3.3. Laporan aktualisasi yang akan disampaikan kepada atasan.

Tahapan Kegiatan 3.1

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari,tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019
Pukul : 15.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran
Kegiatan : Pembahasan tentang data-data postur APBN yang akan dikumpulkan

I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan diskusi kepada mentor terkait presentasi yang akan dilakukan dihadapan seluruh Analis APBN tentang hasil output dari kegiatan aktualisasi. Presentasi output hasil aktualisasi akan dilakukan pada Jumat, 23 Agustus 2019 di Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI pada pukul 14.00 WIB.

II. PENUTUP

Konsultasi ini ditutup pada pukul 16.00 WIB

Jakarta, 23 Agustus 2019



Dwi Resti Pratiwi

Tahapan Kegiatan 3.2



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JL. JENDERAL SISWOKO SOEIROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN www.dpr.go.id

Nomor : BK/13281/SETJEN DAN BK DPR RI/PA/08/2019
Sifat : Parung
Derajal : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Sebagai Peserta

20 Agustus 2019

Yth.
Pejabat dan Analis
di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami beritahukan bahwa dalam rangka peningkatan pemberian dukungan keahlian kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan bermaukus mengadakan Presentasi Aktualisasi CPNS Pusat Kajian Anggaran yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	Jumat, 23 Agustus 2019
Waktu	Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat	Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran Gedung Selatan dan Badan Keahlian Dewan lantai 6 Ruang 611
Agenda	1. Riza Aditya Syafti, S.E. : Critical Review Analisis Inflasi AK. 2. Damia Liara, S.E. : Pemutakhiran Data Postur APBN pada Website PKA 3. Mutiara Shinta Andini, S.E. : Budget Issue Review Perumbahan Ekonomi Indonesia 4. Errita Luluk Zahara, S.E. : Pemutakhiran Menu Formula pada Website PKA

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk menjadi Peserta dalam kegiatan dimaksud.

Atas perihalan dan kehadiran Saudara, kami ucapan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Ay
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si,
NIP. 187109111987031605

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JL. JENDERAL SISWOKO SOEIROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT
TENTANG
"PRESENTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN"
Hari/Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran DPR RI
Gedung Selatan dan BK Lantai 6

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DR ASEP AHMAD SAEFULOH, S.E., M.Si	KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN	<i>AY</i>
2.	DR. INDRA PAHLIWI	KEPALA PUSAT PENELITIAN	
3.	HUSNUL LATIFAH, S.SOS	KEPALA SUBDIV TATA JEGEA PUSAT KAJIAN ANGGARAN	<i>HL</i>
4.	SLAMET WICODO, S.E., M.E	ANALIS APBN AHLI MADIYA	<i>AF</i>
5.	ROBBY ALEXANDER SARIATI, S.E., M.E	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
6.	RASTRI PARIMITA, S.E., M.M	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	<i>RP</i>
7.	DWI RESTI PRATIMI, S.T., M.PM	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	<i>DR</i>
8.	MARRIOT NASUTION, S.E., M.SI	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	<i>MN</i>
9.	ADHI PRASETYO SARIATI, S.E., M.SI	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	<i>AP</i>
10.	MARTHA CAROLINA, S.E., M.M	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	<i>MC</i>
11.	RATNA CHRISTIANINGRUM, S.SUM, S.I	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	<i>RC</i>
12.	DAHRI, S.Si, M.Sc	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
13.	ADE NURUL AIDA, S.E	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	<i>NA</i>

14.	RENDY ALVARO, S.SOS	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	<i>Mu</i>
15.	DEASY DWI RAMIAYU, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	<i>DR</i>
16.	ERVITA LULUK ZAHARA, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	<i>EZ</i>
17.	MUTIARA SHINTA ANCINI, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	<i>MS</i>
18.	NADYA AHDA, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	<i>NA</i>
19.	ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	<i>RT</i>
20.	RIZA ADITYA SYAFFI, S.AK.	ANALIS APBN (CPNS)	<i>RA</i>
21.	SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	<i>SA</i>
22.	SAVITRI WULANDARI, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	<i>SW</i>
23.	TIO RIYONO, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	
24.	DAMIA LIARA, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	<i>DL</i>
25.	MEMED SOBARI	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	<i>MS</i>
26.	MUSSIYATUN	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	<i>M</i>
27.	HILDA PISKA RANDINI, S.I.P.	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	<i>HP</i>
28.	DESSY MULYANTI MARAHAP	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	<i>DM</i>
29.	RAMA WARDIANSYAH		
30.	DIYAH HATI RAH	Analis APBN Non Fungsional	<i>DR</i>
31.	FIRDY HUR AGUSTIANSYAH	Analis APBN	<i>FA</i>
32.	Natalia Michalina		<i>NM</i>
33.	Lurah Lintang A	Analis APBN Non Fungsional	<i>LA</i>
34.	Fachla Pulu Lenggo Gerni	Analis APBN Non Fungsional	<i>FG</i>
35.			<i>FG</i>
36.			

Tahapan Kegaitan 3.3



Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

CATATAN HASIL PENYERAHAN LAPORAN AKTUALISASI KEPADA ATASAN

Hari, Tanggal	:	Jum'at, 30 Agustus 2019
Pukul	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Kegiatan	:	CPNS Menyerahkan Laporan Aktualisasi yang Telah Dibuat Kepada Atasan dan Mentor
Kepala PKA	:	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

1. PEMBUKAAN

CPNS yang telah menyelesaikan Laporan Aktualisasi menyerahkan Laporan Aktualisasinya kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Aktualisasi yang telah dilakukan. Proses penyerahan Laporan ini dilakukan pada hari Jumat, 30 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran. Atasan menerima Laporan Aktualisasi yang telah dibuat oleh CPNS.

2. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah atasan menerima Laporan Aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh CPNS.

3. PENUTUP

Demikianlah Catatan atas hasil penyerahan Laporan Aktualisasi Damia Liana dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran.

Jakarta, 30 Agustus 2019

Mengetahui
Kepala Pusat Kajian Anggaran

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005

LAMPIRAN TAHAPAN KEGIATAN 4

- 4.1. Laporan singkat hasil konsultasi dengan mentor;
- 4.2. Tersedianya data-data postur APBN pada website puskajianggaran.dprr.go.id

Tahapan Kegiatan 4.1

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari,tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
Pukul : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran
Kegiatan : Pembahasan tentang data-data postur APBN yang akan dikumpulkan

I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan diskusi kepada mentor terkait laporan aktualisasi yang akan diserahkan kepada atasan. Pada kegiatan ini penulis menyerahkan laporan aktualisasi kepada mentor dan menerima saran dan *feedback* dari mentor sebelum laporan diberikan kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran.

II. PENUTUP

Konsultasi ini ditutup pada pukul 14.30 WIB

Jakarta, 27 Agustus 2019



Dwi Resti Pratiwi

Tahapan Kegiatan 4.2

